

ABSTRAK

FAJAR RIZKI MK, Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pemekaran Daerah Di Pulau Madura, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di bawah Bimbingan : Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H., M.H.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana keterlibatan pemerintah daerah dalam membahas dan melaksanakan pemekaran daerah di Madura. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field resech*) dengan pendekatan penelitian yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di pulau Madura sudah memberikan kuasa sepenuhnya kepada PnP3M untuk menjadikan Madura menjadi provinsi, Bukan hanya potensi budaya dan dimensi kehidupan masyarakatnya melainkan, juga aspek kebijakan yang terkait dengan masa depan pemerintahan di Madura. Madura yang memiliki 4 Kabupaten dengan 4 pemerintahan daerah juga, pemerintahan daerah yang dimaksud disini sesuai dengan UU tentang pokok – pokok pemerintahan daerah, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah kepala daerah. Kepala daerah yang pada umumnya yaitu , Gubernur, Bupati dan DPRD. Pihak Pemerintah di Pulau madura yang mana terdiri dari 4 (empat) Kupaten BUPATI dan pimpinan DPRD di empat kabupaten yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Suemene. Sudah Memberikan Kuasa Penuh Terhadap PnP3M Panitia Nasional Pembentukan Provinsi Madura. Pihak Pemerintah Di 4 (empat) Kabupaten di pulau Madura sudah siap jika akan melakukan pemekaran di tiap kabupaten untuk mendukung Panitia nasional pembentukan provinsi madura dalam memperjuangkan pembentukan provinsi madura. Adapun pasal yang mengatur tentang pemekaran yaitu Pasal 32 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah Kabupaten / Kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

Kata Kunci: keterlibatan, Pemerintah Daerah, Provinsi, Pulau Madura

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
4.1 Kegunaan Teoritis.....	6
4.2 Kegunaan Praktis.....	6
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian	11
6.1Jenis Penelitian.....	11
6.2 Pendekatan Penelitian	11
6.3 Sumber Data.....	11
6.4 Sampling	12
1.7 Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.8 Pengolahan Data.....	15
1.9 Analisis Data	16
1.10 Sistemetika Penulisan	17
BAB II	18

BEBERAPA PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMEKARAN DAERAH	18
2.1 Pengertian Peran.....	18
2.2 Pengertian Pemerintah Daerah	20
2.3 Pengertian Pemekaran Daerah.....	23
2.4 Teori pemerintahan daerah	24
4.1 Pemerintahan daerah.....	24
4.2 Penyelenggaraan pemerintahan daerah.....	25
2.5 Teori Kewenangan	28
BAB III	33
KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN PEMEKARAN DAERAH.....	33
3.1 Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Pembahasan Pemekaran Daerah....	36
3.1.1 Landasan Pemekaran Daerah	38
Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pemekaran Daerah Di Pulau Madura	41
3.1.2 Faktor Potensi Daerah Yang Perlu Di Pertimbangkan.....	43
3.2 Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemekaran Daerah	46
Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pemekaran Daerah Di Pulau Madura	48
3.2.1 keterlibatan Pemerintah Daerah	50
3.2.2 Keterlibatan Kyai.....	52
BAB IV	60
PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

Tabel 2 Nama – nama pemerintah daerah yang terlibat dalam penelitian (Skripsi) ini, dalam pembahasan pemekaran daerah.

Tabel 3 : Hasil Penelitian pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan tingkat Bupati dan DPRD Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pamekasan

Tabel 4 Data Peta Kabupaten Bangkalan

Tabel 5 Data Peta Kabupaten Pamekasan

Tabel 6: Data Peta Perbatasan Kabupaten Sumenep